

**ANALISIS KEMAMPUAN KEUANGAN DAERAH DAN *FISCAL STRESS*
TERHADAP ALOKASI BELANJA MODAL DI SUMATERA BAGIAN
SELATAN**



Skripsi Oleh:

KURNIA SARI

01021281722103

Ekonomi Pembangunan

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Meraih Gelar Sarjana Ekonomi

KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET DAN TEKNOLOGI

UNIVERSITAS SRIWIJAYA

FAKULTAS EKONOMI

2021

LEMBAR PERSETUJUAN UJIAN KOMPREHENSIF

ANALISIS KEMAMPUAN KEUANGAN DAERAH DAN *FISCAL STRESS* TERHADAP ALOKASI BELAJA MODAL DI SUMATERA BAGIAN SELATAN

Disusun oleh:

Nama : Kurnia Sari
NIM : 01021281722103
Fakultas : Ekonomi
Jurusan : Ekonomi Pembangunan
Bidang Kajian/Konsentrasi : Ekonomi Keuangan Daerah

Disetujui untuk digunakan dalam ujian komprehensif.

TANGGAL PERSETUJUAN

Tanggal :

Tanggal : 11/6
21 Mei 2021

DOSEN PEMBIMBING

Ketua : Dr. Azwardi, S.E., M.Si
NIP. 196805181993031003

Anggota : Imelda, S.E., M.S.E
NIP. 197703092009122002

LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI

ANALISIS KEMAMPUAN KEUANGAN DAERAH DAN *FISCAL STRESS* TERHADAP ALOKASI BELANJA MODAL DI SUMATERA BAGIAN SELATAN

Disusun Oleh:

Nama : Kurnia Sari

NIM : 01021281722103

Fakultas : Ekonomi

Jurusan : Ekonomi Pembangunan

Bidang Kajian/Konsentrasi : Keuangan Daerah

Telah diuji dalam ujian komprehensif pada tanggal 02 Juli 2021 dan telah memenuhi syarat untuk diterima.

Panitia Ujian Komprehensif
Palembang, Juli 2021

Ketua

Dr. Azwardi, S.E., M.Si
NIP: 196805181993031003

Anggota

Imelda, S.E., M.S.E
NIP: 197703092009122002

Anggota

Feny Marissa, S.E., M.Si
NIP: 199004072018032001

Mengetahui

Ketua Jurusan Ekonomi Pembangunan

ASLI

5-8-2021
JUR. EK. PEMBANGUNAN
FAKULTAS EKONOMI UNSRI

Dr. Mukhlis, S.E., M.Si
NIP: 197304062010121001

SURAT PERNYATAAN INTEGRITAS KARYA ILMIAH

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama Mahasiswa : Kurnia Sari
NIM : 01021281722103
Fakultas : Ekonomi
Jurusan : Ekonomi Pembangunan
Bidang Kajian/Konsentrasi : Ekonomi Keuangan Daerah

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang berjudul:
Analisis Kemampuan Keuangan Daerah dan *Fiscal Stress* terhadap Alokasi
Belanja Modal di Sumatera Bagian Selatan

Pembimbing:

Ketua : Dr. Azwardi, S.E., M.Si
Anggota : Imelda, S.E., M.S.E
Tanggal Ujian : 02 Juli 2021

Adalah benar hasil karya saya sendiri. Dalam skripsi ini tidak ada kutipan hasil karya orang lain yang tidak disebutkan sumbernya.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, dan apabila pernyataan saya ini tidak benar dikemudian hari, saya bersedia dicabut predikat kelulusan dan gelar kesarjanaan.

Palembang, 20 Juli 2021
Pembuat Pernyataan,



Kurnia Sari
NIM. 01021281722103

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Allah SWT atas rahmat dan karunia-Nya sehingga saya dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Analisis Kemampuan Keuangan Daerah dan *Fiscal Stress* terhadap Alokasi Belanja Modal di Sumatera Bagian Selatan” sebagai salah satu syarat dalam meraih gelar Sarjana Ekonomi program Strata Satu (S-1) Jurusan Ekonomi Pembangunan, Fakultas Ekonomi, Universitas Sriwijaya.

Skripsi ini menganalisis bagaimana kemampuan keuangan daerah dan *fiscal stress* serta melihat pengaruhnya terhadap alokasi belanja modal di Sumatera Bagian Selatan. Penulis menyadari bahwa penyusunan skripsi ini jauh dari kata sempurna, oleh karena itu penulis mengharapkan kritik serta saran yang bersifat membangun demi kesempurnaan skripsi ini. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi para pembaca.

Palembang, 20 Juli 2021

Kurnia Sari
NIM. 01021281722103

UCAPAN TERIMA KASIH

Selama penelitian dan penyusunan skripsi ini, penulis tidak luput dari berbagai kendala. Kendala tersebut dapat teratasi berkat bantuan, bimbingan dan dukungan dari berbagai pihak. Penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih kepada:

1. Bapak Dr. Azwardi, S.E., M.Si dan Ibu Imelda S.E., M.S.E selaku dosen pembimbing yang telah mengorbankan waktu, tenaga dan ilmu-ilmunya untuk dapat membimbing serta memberikan saran dalam menyelesaikan skripsi ini.
2. Bapak Dr. Mukhlis, S.E., M.Si selaku Ketua Jurusan Ekonomi Pembangunan Fakultas Ekonomi Universitas Sriwijaya.
3. Ibu Feny Marissa, S.E., M.Si selaku dosen penguji yang telah memberikan kritik dan saran-saran terbaik sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.
4. Kedua orang tua dan adikku yang selalu memberikan dukungan, motivasi, serta doa-doa terbaiknya untuk penulis.
5. Semua pihak yang terlibat dalam penyusunan skripsi ini yang tidak dapat disebutkan satu per satu.

Palembang, 20 Juli 2021

Kurnia Sari
Nim. 01021281722103

ABSTRAK

ANALISIS KEMAMPUAN KEUANGAN DAERAH DAN *FISCAL STRESS* TERHADAP ALOKASI BELANJA MODAL DI SUMATERA BAGIAN SELATAN

Oleh:

Kurnia Sari; Azwardi; Imelda

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh kemampuan keuangan yaitu derajat desentralisasi fiskal, rasio kemandirian keuangan daerah dan variabel *fiscal stress* terhadap alokasi belanja modal di Sumatera Bagian Selatan. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data panel dari 60 kabupaten/kota di Sumatera Bagian Selatan dalam rentang tahun 2015-2019. Teknik analisis data yang digunakan adalah teknik analisis regresi linear berganda data panel dengan metode pendekatan *random effect model* (REM). Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa daerah perkotaan lebih memiliki kemampuan keuangan dalam menyelenggarakan otonomi daerah dibandingkan pada daerah kabupaten. Sedangkan kondisi *fiscal stress* menunjukkan bahwa masih banyak daerah kabupaten/kota di Sumatera Bagian Selatan yang mengalami kondisi *fiscal stress*. Hasil estimasi menunjukkan bahwa variabel *fiscal stress* berpengaruh positif dan signifikan terhadap alokasi belanja modal, sedangkan variabel derajat desentralisasi fiskal dan rasio kemandirian keuangan daerah tidak berpengaruh signifikan terhadap alokasi belanja modal di Sumatera Bagian Selatan.

Kata Kunci: *Kemampuan Keuangan, Derajat Desentralisasi Fiskal, Rasio Kemandirian Keuangan, Fiscal Stress, Alokasi Belanja Modal*

Ketua,



Dr. Azwardi, S.E., M.Si
NIP. 196805181993031003

Anggota,



Imelda, S.E., M.S.E.
NIP. 197703092009122002

Mengetahui,
Ketua Jurusan Ekonomi Pembangunan



Dr. Mukhlis, S.E., M.Si
NIP. 197304062010121001

ABSTRACT

ANALYSIS OF REGIONAL FINANCIAL CAPABILITY AND FISCAL STRESS ON CAPITAL EXPENDITURE ALLOCATION IN SOUTH SUMATERA

By:

Kurnia Sari; Azwardi; Imelda

This study aimed to analyze the effect of financial capacity, namely the degree of fiscal decentralization, the ratio of regional financial independence and the variable fiscal stress on the allocation of capital expenditures in Southern Sumatra. The data used in this study is panel data from 60 districts/cities in Southern Sumatra in the 2015-2019 range. The data analysis technique used is the multiple linear regression analysis technique of panel data using the random effect model (REM) approach. The results of this study indicate that urban areas have more financial capacity in implementing regional autonomy compared to districts. Meanwhile, fiscal stress conditions indicate that there are still many districts/cities in Southern Sumatra that are experiencing fiscal stress conditions. The estimation results show that the fiscal stress variable has a significant effect on the allocation of capital expenditures, while the variables of the degree of fiscal decentralization and the ratio of regional financial independence have no significant effect on the allocation of capital expenditures in Southern Sumatra.

Keywords: *Financial Capability, Degree of Fiscal Decentralization, Financial Independence Ratio, Fiscal Stress, Capital Expenditure Allocation*

Chairman,



Dr. Azwardi, SE, M.Si
NIP. 196805181993031003

Member



Imelda, S.E., M.S.E.
NIP. 197703092009122002

Approved by,
Head of Development Economics Program



Dr. Mukhlis, SE, M. Si
NIP. 197304062010121001

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

	Nama	Kurnia Sari
	NIM	01021281722103
	Tempat, Tanggal Lahir	Palembang, 01 Maret 2000
	Alamat	Jalan Naskah 3 Lr. Nangka RT.12/RW.04 Kecamatan Sukarami, Kota Palembang
	Nomor Handphone	0895615475459
Agama	Islam	
Jenis Kelamin	Perempuan	
Status	Belum Menikah	
Kewarganegaraan	Indonesia	
Tinggi	154 cm	
Berat Badan	47 kg	
Email	kurniawxyz@gmail.com	
PENDIDIKAN FORMAL		
2005 – 2011	SD Negeri 149 Palembang	
2011 – 2014	SMP Negeri 40 Palembang	
2014 – 2017	SMK Negeri 1 Palembang	
2017 – 2021	Fakultas Ekonomi, Jurusan Ekonomi Pembangunan, Universitas Sriwijaya	
RIWAYAT ORGANISASI		
2017 – 2018	Staf Komisi Pemilihan Umum Fakultas Ekonomi Universitas Sriwijaya	
PENGALAMAN PELATIHAN		
2019	Pelatihan Pengelolaan Dana Transfer ke Daerah dan APBD kerjasama DJPK Kementerian Keuangan dengan Fakultas Ekonomi Universitas Sriwijaya	

DAFTAR ISI

LEMBAR PERSETUJUAN KOMPREHENSIF	i
LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI	ii
SURAT PERNYATAAN INTEGRITAS KARYA ILMIAH.....	iii
KATA PENGANTAR.....	iv
UCAPAN TERIMA KASIH	v
ABSTRAK	vi
ABSTRACT.....	vii
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	viii
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR TABEL	xi
DAFTAR GAMBAR.....	xiii
DAFTAR LAMPIRAN	xiv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Perumusan Masalah.....	8
1.3. Tujuan Penelitian.....	9
1.4. Manfaat Penelitian.....	9
BAB II STUDI KEPUSTAKAAN	10
2.1. Landasan Teori	10
2.1.1. Teori Pengeluaran Pemerintah.....	10
2.2. Definisi dan Konsep	13
2.2.1. Otonomi Daerah.....	13
2.2.2. Kemampuan Keuangan Daerah.....	15
2.2.3. <i>Fiscal Stress</i> (Tekanan Fiskal).....	20
2.2.4. Alokasi Belanja Modal.....	22
2.3. Penelitian Terdahulu.....	23
2.4. Kerangka Pikir.....	26
2.5. Hipotesis Penelitian	28
BAB III METODE PENELITIAN	29
3.1. Ruang Lingkup Penelitian	29
3.2. Jenis Data dan Sumber Data.....	29
3.3. Metode Pengumpulan Data	29
3.4. Definisi Operasional dan Pengukuran Variabel Penelitian	30
3.4.1. Alokasi Belanja Modal.....	30
3.4.2. Derajat Desentralisasi Fiskal.....	30
3.4.3. Rasio Kemandirian Keuangan Daerah.....	31
3.4.4. <i>Fiscal Stress</i>	31
3.5. Teknik Analisis Data	31
3.5.1. Analisis Regresi Data Panel	32
3.5.2. Metode Estimasi Model Regresi Data Panel.....	33
3.5.3. Pemilihan Model Regresi Data Panel	35

3.6. Pengujian Secara Statistik	36
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	39
4.1. Hasil penelitian.....	39
4.1.1. Gambaran Umum Sumatera Bagian Selatan	39
4.1.2. Perkembangan Derajat Desentralisasi Fiskal di Sumatera Bagian Selatan.....	40
4.1.3. Perkembangan Rasio Kemandirian Keuangan Daerah di Sumatera Bagian Selatan	49
4.1.4. Perkembangan <i>Fiscal Stress</i> di Sumatera Bagian Selatan.....	59
4.1.5. Perkembangan Alokasi Belanja Modal di Sumatera Bagian Selatan ..	71
4.1.6. Estimasi Model Regresi Data Panel.....	80
4.1.7. Uji Pemilihan Model Regresi Data Panel	82
4.1.8. Estimasi Data Panel Pendekatan <i>Random Effect Model</i>	84
4.1.9. Pengujian Secara Statistik.....	89
4.2. Pembahasan	92
4.2.1. Pengaruh Derajat Desentralisasi Fiskal terhadap Alokasi Belanja Modal di Sumatera Bagian Selatan.....	92
4.2.2. Pengaruh Rasio Kemandirian Keuangan Daerah terhadap Alokasi Belanja Modal di Sumatera Bagian Selatan	95
4.2.3. Pengaruh <i>Fiscal Stress</i> terhadap Alokasi Belanja Modal di Sumatera Bagian Selatan	99
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	103
5.1. Kesimpulan.....	103
5.2. Saran	104
DAFTAR PUSTAKA	106
LAMPIRAN.....	109

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	Perbandingan Proporsi Alokasi Belanja Modal di Provinsi Sumatera Bagian Selatan Tahun 2017-2019 (Dalam Juta Rupiah).....	7
Tabel 2.1	Skala Interval Pengukuran Derajat Desentralisasi Fiskal	17
Tabel 2.2	Skala Interval Rasio Kemandirian Keuangan Daerah.....	18
Tabel 4.6	Derajat Desentralisasi Fiskal Kabupaten/Kota di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2015-2019 (dalam persen)	41
Tabel 4.7	Derajat Desentralisasi Fiskal Kabupaten/Kota di Provinsi Bengkulu Tahun 2015-2019 (dalam persen)	42
Tabel 4.8	Derajat Desentralisasi Fiskal Kabupaten/Kota di Provinsi Jambi Tahun 2015-2019 (dalam persen)	44
Tabel 4.9	Derajat Desentralisasi Fiskal Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2015-2019 (dalam persen).....	45
Tabel 4.10	Derajat Desentralisasi Fiskal Kabupaten/Kota di Provinsi Lampung Tahun 2015-2019 (dalam persen)	47
Tabel 4.11	Rasio Kemandirian Keuangan Kabupaten/Kota di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2015-2019 (dalam persen)	50
Tabel 4.12	Rasio Kemandirian Keuangan Kabupaten/Kota di Provinsi Bengkulu Tahun 2015-2019 (dalam persen)	52
Tabel 4.13	Rasio Kemandirian Keuangan Kabupaten/Kota di Provinsi Jambi Tahun 2015-2019 (dalam persen)	53
Tabel 4.14	Rasio Kemandirian Keuangan Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2015-2019 (dalam persen).....	55
Tabel 4.15	Rasio Kemandirian Keuangan Kabupaten/Kota di Provinsi Lampung Tahun 2015-2019 (dalam persen)	57
Tabel 4.16	Kondisi <i>Fiscal Stress</i> Kabupaten/Kota di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2015-2019 (dalam persen).....	60
Tabel 4.17	Kondisi <i>Fiscal Stress</i> Kabupaten/Kota di Provinsi Bengkulu Tahun 2015-2019 (dalam persen).....	62
Tabel 4.18	Kondisi <i>Fiscal Stress</i> Kabupaten/Kota di Provinsi Jambi Tahun 2015-2019 (dalam persen)	64
Tabel 4.19	Kondisi <i>Fiscal Stress</i> Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2015-2019 (dalam persen)	66
Tabel 4.20	Kondisi <i>Fiscal Stress</i> Kabupaten/Kota di Provinsi Lampung Tahun 2015-2019 (dalam persen).....	68
Tabel 4.21	Alokasi Belanja Modal Kabupaten/Kota di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2015-2019 (dalam persen)	72
Tabel 4.22	Alokasi Belanja Modal Kabupaten/Kota di Provinsi Bengkulu Tahun 2015-2019 (dalam persen).....	73

Tabel 4.23 Alokasi Belanja Modal Kabupaten/Kota di Provinsi Jambi Tahun 2015-2019 (dalam persen).....	75
Tabel 4.24 Alokasi Belanja Modal Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2015-2019 (dalam persen)	77
Tabel 4.25 Alokasi Belanja Modal Kabupaten/Kota di Provinsi Lampung Tahun 2015-2019 (dalam persen).....	79
Tabel 4.26 Hasil Estimasi Regresi Data Panel	81
Tabel 4.27 Hasil Chow Test	82
Tabel 4.28 Hasil <i>Hausman Test</i>	83
Tabel 4.29 Hasil LM-Test	83
Tabel 4.30 Hasil Estimasi Pendekatan <i>Random Effect Model</i>	84
Tabel 4.31 Hasil Intersep Kabupaten/Kota di Sumatera Bagian Selatan	86
Tabel 4.32 Hasil Uji-F.....	90
Tabel 4.33 Hasil Uji-t.....	90
Tabel 4.34 Perolehan Derajat Desentralisasi Fiskal di Sumatera Bagian Selatan	93
Tabel 4.35 Perolehan Rasio Kemandirian Keuangan Daerah di Sumatera Bagian Selatan	96
Tabel 4.36 Perolehan <i>Fiscal Stress</i> di Sumatera Bagian Selatan	101

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1	Pendapatan dan Belanja Daerah di Provinsi Sumatera Bagian Selatan Tahun 2019 (Dalam Juta Rupiah).....	2
Gambar 1.2	Pendapatan Asli Daerah dan Dana Perimbangan di Sumatera Bagian Selatan Tahun 2019 (Dalam Juta Rupiah)	4
Gambar 2.1	Kurva Teori Pengeluaran Pemerintah Peacock dan Wiseman.....	12
Gambar 2.2	Kerangka Pikir	28
Gambar 4.6	Perbandingan Rata-rata <i>Tax Effort</i> Kabupaten/Kota di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2015-2019.....	61
Gambar 4.7	Perbandingan Rata-rata <i>Tax Effort</i> Kabupaten/Kota di Provinsi Bengkulu Tahun 2015-2019	63
Gambar 4.8	Perbandingan Rata-rata <i>Tax Effort</i> Kabupaten/Kota di Provinsi Jambi Tahun 2015-2019	65
Gambar 4.9	Perbandingan Rata-rata <i>Tax Effort</i> Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2015-2019	67
Gambar 4.10	Perbandingan Rata-rata <i>Tax Effort</i> Kabupaten/Kota di Provinsi Lampung Tahun 2015-2019.....	69

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Perhitungan Derajat Desentralisasi Fiskal di Sumatera Bagian Selatan	110
Lampiran 2 Perhitungan Rasio Kemandirian Keuangan Daerah di Sumatera Bagian Selatan.....	120
Lampiran 3 Perhitungan Fiscal Stress Di Sumatera Bagian Selatan.....	131
Lampiran 4 Hasil Estimasi Pendekatan Common Effect Model (CEM).....	143
Lampiran 5 Hasil Estimasi Pendekatan Fixed Effect Model (FEM)	144
Lampiran 6 Hasil Estimasi Pendekatan Random Effect Model (REM)	146
Lampiran 7 Hasil Chow Test	148
Lampiran 8 Hasil Hausman Test.....	149
Lampiran 9 Hasil LM-Test	150

BAB I

PENDAHULUAN

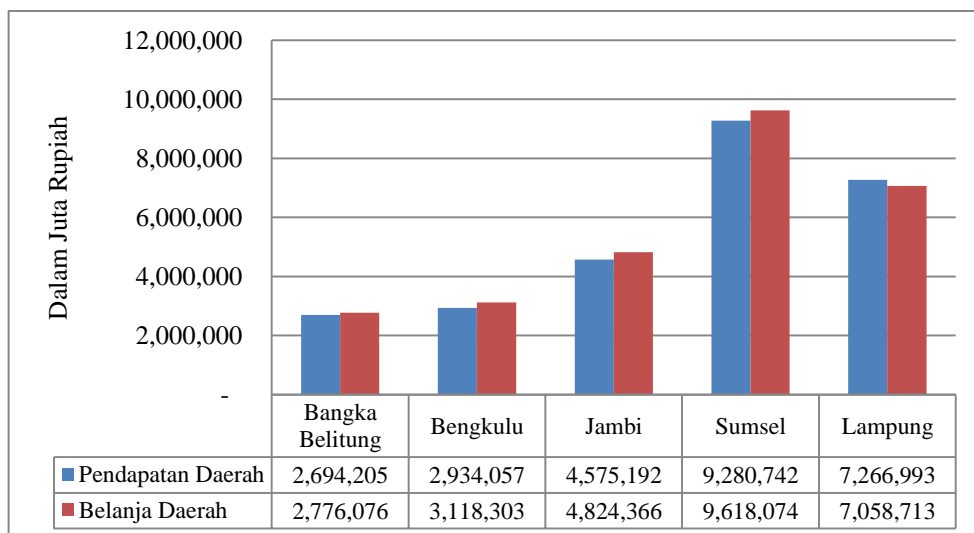
1.1. Latar Belakang

Penerapan sentralisasi di Indonesia menimbulkan permasalahan, salah satunya adalah permasalahan pembangunan di daerah. Dengan penerapan sistem pembangunan yang terpusat banyak potensi daerah baik itu sumber daya alam maupun sumber daya manusia yang belum dimanfaatkan secara optimal. Karena permasalahan ini, masyarakat menuntut adanya perubahan secara mendasar dalam sistem pemerintahan. Hal ini bertujuan untuk memperbaiki dan mengembangkan pembangunan yang ada di daerah (Sjafrizal, 2014).

Di Indonesia, otonomi daerah telah berjalan selama 21 tahun sejak pertama kali diberlakukan pada tanggal 1 Januari 2001. Namun sebelum otonomi daerah resmi diberlakukan, pemerintah telah menetapkan Undang-Undang No. 22 Tahun 1999 tentang pemerintahan daerah. Sejak diberlakukan maka sistem pemerintahan dan pembangunan di tanah air telah memasuki era baru, dari sistem pembangunan terpusat atau sentralisasi menjadi era otonomi daerah. Namun dewasa ini ada perubahan terhadap Undang-Undang tersebut diantaranya diubah menjadi Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 dan terakhir diubah menjadi Undang-Undang No. 23 Tahun 2014. Seiring dengan penetapan Undang-Undang tentang pemerintahan daerah, maka ditetapkan pula Undang-Undang No. 25 Tahun 1999 yang kemudian diubah menjadi Undang-Undang No. 33 Tahun 2004 tentang perimbangan keuangan pemerintah pusat dan daerah guna mendukung upaya penyelenggaraan otonomi daerah. Sejak diberlakukannya perundang-

undangan tersebut maka pemerintah daerah ditempatkan sebagai pelaku utama dalam pelaksanaan kebijakan dan pembangunan ekonomi (Prihatiningsih, 2010).

Otonomi daerah adalah ketetapan yang meliputi hak, wewenang dan kewajiban yang diberikan oleh pemerintah pusat kepada daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan maupun melakukan pengelolaan keuangan berdasarkan perundang-undangan yang berlaku. Dengan adanya otonomi pemerintah daerah dapat memanfaatkan, mengoptimalkan serta mengembangkan potensi-potensi yang dimiliki oleh daerahnya. Halim (2004) mengatakan ciri utama yang menunjukkan suatu daerah mampu melakukan otonomi terletak pada kemampuan keuangan daerahnya. Kemampuan daerah otonom dalam melakukan pengelolaan keuangannya tertuang dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Dengan kata lain, APBD adalah instrument kebijakan yang paling mendasar bagi pemerintah daerah (Assyurriani, 2015).



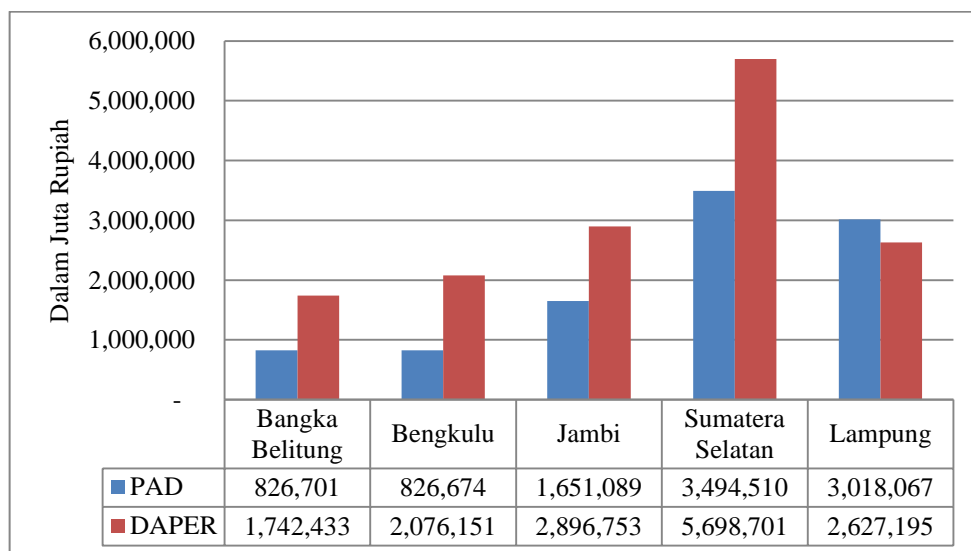
Sumber: Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan, 2019, Data Diolah.

Gambar 1.1 Pendapatan dan Belanja Daerah di Sumatera Bagian Selatan Tahun 2019 (Dalam Juta Rupiah)

Gambar 1.1 menunjukkan perbandingan antara pendapatan dan belanja daerah di Sumatera Bagian Selatan Tahun 2019. Sumatera Bagian Selatan (Sumbagsel) terdiri dari 5 provinsi yakni Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Provinsi Bengkulu, Provinsi Jambi, Provinsi Sumatera Selatan dan Provinsi Lampung. Dari kelima provinsi tersebut maka provinsi yang memiliki APBD terbesar adalah Provinsi Sumatera Selatan dengan jumlah pendapatan daerah sebesar Rp. 9,280,742 Juta Rupiah dan jumlah belanja daerah sebesar Rp. 9,618,074 Juta Rupiah. Sedangkan provinsi yang memiliki APBD terendah adalah Provinsi Kep. Bangka Belitung dengan jumlah pendapatan daerah sebesar Rp. 2,694,205 Juta Rupiah dan jumlah belanja daerah sebesar Rp. 2,776,076 Juta Rupiah. Terlihat kelima Provinsi di Sumatera Bagian Selatan telah memiliki jumlah APBD yang relatif besar dengan pengeluaran yang dilakukan oleh pemerintah daerah adalah untuk membiayai pengeluaran yang bersifat konsumtif dan pengeluaran yang bersifat pembangunan.

Dengan adanya otonomi daerah, daerah otonom diharapkan semakin mandiri dan mengurangi ketergantungan pada pemerintah pusat baik dalam pembiayaan ataupun pengelolaan keuangan daerah (Sularso dan Restianto, 2011). Pengelolaan keuangan yang baik pada suatu daerah dapat diukur melalui jumlah penerimaan daerahnya terutama Pendapatan Asli Daerah (PAD). Menurut Undang-Undang No. 33 Tahun 2004, PAD adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan perundang-undangan yang telah ditetapkan. Jika jumlah PAD yang dimiliki suatu daerah lebih besar, maka

semakin besar pula ketersediaan dana untuk membiayai penyelenggaraan otonomi daerah. Jumlah kontribusi PAD yang lebih besar menandakan bahwa daerah sudah berhasil mengidentifikasi dan mengoptimalkan potensi-potensi sumber pendapatan yang dimiliki daerahnya. Namun dalam hal pelaksanaan otonomi daerah ternyata masih banyak daerah-daerah yang memiliki permasalahan yakni lebih besarnya kontribusi dana transfer daripada pendapatan asli daerah. Besarnya jumlah kontribusi dana transfer daripada jumlah PAD menandakan bahwa semakin tinggi pula tingkat ketergantungan daerah otonom pada pemerintah pusat. Namun pada kenyataannya tidak semua daerah mampu lepas dari bantuan pemerintah pusat, hal ini dikarenakan tingkat kebutuhan antar daerah yang tidak sama. Oleh karena itu pemerintah pusat melakukan transfer dana berupa dana perimbangan (Christy dan Adi, 2009).



Sumber: Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan, 2019, Data Diolah.

Gambar 1.2 Pendapatan Asli Daerah dan Dana Perimbangan di Sumatera Bagian Selatan Tahun 2019 (Dalam Juta Rupiah)

Gambar 1.2 memperlihatkan perkembangan PAD dan perkembangan Dana Perimbangan di Sumatera Bagian Selatan Tahun 2019. Berdasarkan laporan realisasi APBD tahun 2019 maka provinsi yang memiliki jumlah pendapatan asli daerah yang lebih besar daripada jumlah dana perimbangan adalah Provinsi Lampung dengan Jumlah PAD sebesar Rp. 3,018,067 Juta Rupiah dan Dana Transfer sebesar 2,627,195 Juta Rupiah. Jumlah PAD yang lebih besar daripada jumlah dana transfer mengindikasikan bahwa Provinsi Lampung sudah sangat baik dalam mengoptimalkan potensi daerahnya serta memiliki kemampuan dalam mengelola sumber-sumber pendapatan yang dimiliki daerahnya. Namun jika dibandingkan antar provinsi maka Provinsi Sumatera Selatan memiliki PAD tertinggi yaitu sebesar 3,494,510 Juta Rupiah. Berdasarkan data di atas, selain Provinsi Lampung maka penerimaan daerah dari 4 (empat) provinsi lainnya masih didominasi oleh dana transfer dari pemerintah pusat. Hal ini dikarenakan adanya kapasitas fiskal dan intensitas kebutuhan yang tidak sama pada tiap daerah. Savitry *et al.* (2011) mengatakan daerah otonom harus mampu mendanai penyelenggaraan pemerintahannya dengan tingkat ketergantungan pada pemerintah pusat memiliki proporsi yang semakin rendah.

Dalam menilai kemampuan suatu daerah dalam mengelola keuangannya, maka dapat digunakan indikator kinerja keuangan. Kinerja keuangan daerah diukur dengan menggunakan analisa rasio keuangan. Apabila rasio-rasio keuangan dinyatakan baik, maka daerah otonom dianggap memiliki kemampuan keuangan baik dalam hal pembiayaan dan penyelenggaraan otonomi daerah. Selain untuk menilai kemampuan suatu daerah, indikator kinerja keuangan pada

pemerintah daerah dapat dijadikan dasar penilaian akuntabilitas dalam pelaksanaan otonomi daerah (Sularso dan Restianto, 2011). Menurut Halim (2012) ada beberapa rasio keuangan yang dikembangkan dalam organisasi pemerintah yaitu rasio kemandirian, rasio efisiensi PAD, rasio efektivitas PAD, rasio aktivitas, *debt service coverage ratio* dan rasio pertumbuhan. Sedangkan berdasar penelitian dari Sularso dan Restianto (2011) indikator ukuran kinerja keuangan meliputi derajat desentralisasi, tingkat ketergantungan keuangan, rasio kemandirian keuangan, rasio efektivitas, rasio efisiensi, rasio keserasian, *debt service coverage ratio* dan rasio pertumbuhan.

Otonomi daerah menuntut adanya peningkatan kemandirian pada daerah. Daerah yang beruntung adalah daerah yang memiliki sumber-sumber pendapatan potensial yang berasal dari pajak, retribusi daerah maupun ketersediaan sumber daya alam yang dimiliki daerah itu sendiri. Tapi di sisi lain ada beberapa daerah yang karena adanya otonomi bisa menimbulkan persoalan sendiri bagi daerahnya. Daerah dapat mengalami *fiscal stress* atau tekanan fiskal, hal ini dikarenakan daerah dituntut untuk mengoptimalkan dan menggali potensi serta kapasitas fiskalnya untuk meminimalisir ketergantungan pada sumber penerimaan daerah (Setyawan dan Adi, 2008). Hal ini sejalan dengan Adriana *et al.* (2017) yang menyebutkan saat *fiscal stress* terjadi, hal tersebut dikarenakan kebijakan otonomi daerah yang menuntut kemandirian pada daerah yang dicerminkan dengan peningkatan penerimaan daerah. Pada saat daerah mengalami *fiscal stress*, pemerintah cenderung menggali potensi penerimaan pajak untuk meningkatkan penerimaan daerahnya (Shamsub dan Akoto, 2004). Indeks upaya pajak yang

tinggi mencerminkan kondisi *fiscal stress* yang tinggi pula. *Fiscal stress* menjadi salah satu pertimbangan dalam mempengaruhi kebijakan belanja pemerintah.

Pengalokasian belanja yang efektif akan berdampak pada kemajuan suatu daerah dan salah satu faktor yang mempengaruhi kemajuan suatu daerah adalah pengeluaran investasi yang dikeluarkan oleh daerah otonom (Sularso dan Restianto, 2011). Belanja modal dalam APBD adalah indikator yang menjadi besar kecilnya investasi pada daerah. Investasi yang dikeluarkan oleh daerah otonom akan membentuk modal daerah yang pada akhirnya akan menjadi sumber pendanaan untuk pembangunan. Menurut Mardiasmo (2009) investasi dalam bentuk belanja modal akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan pelayanan publik. Dalam mempercepat peningkatan pembangunan dan pelayanan publik masyarakat, daerah otonom harus mengalokasikan anggarannya sebesar 30 (tiga puluh) persen dari total belanja daerah untuk belanja infrastruktur yang merupakan bagian dari belanja modal (Permendagri, 2013)

Tabel 1.1 Perbandingan Proporsi Alokasi Belanja Modal di Sumatera Bagian Selatan Tahun 2017-2019 (Dalam Juta Rupiah)

Provinsi	Tahun								
	2017			2018			2019		
	ABM	TBD	%	ABM	TBD	%	ABM	TBD	%
Bangka Belitung	368,209	2,359,078	16%	315,397	2,364,245	13%	441,201	2,776,076	16%
Bengkulu	711,073	2,868,814	25%	618,477	2,979,578	21%	741,823	3,118,303	24%
Jambi	895,648	4,132,941	22%	784,723	4,198,255	19%	866,500	4,824,366	18%
Sumsel	1,377,382	6,409,382	21%	1,537,275	7,941,143	19%	1,606,219	9,618,074	17%
Lampung	1,451,484	6,948,838	21%	1,729,327	7,538,988	23%	1,014,037	7,058,713	14%

Sumber: Laporan Realisasi APBD, 2017-2019. Data Diolah.

Tabel 1.1 memperlihatkan perbandingan proporsi alokasi belanja modal terhadap total belanja daerah di Provinsi Sumatera Bagian Selatan Tahun 2017-2019. Tabel di atas menunjukkan proporsi alokasi belanja modal yang berfluktuatif namun belum mencapai target alokasi yang ditetapkan. Rendahnya proporsi alokasi belanja modal mengindikasikan bahwa belanja modal belum menjadi belanja prioritas pada masing-masing provinsi. Padahal belanja modal tergolong belanja yang bersifat produktif. Belum tercapainya target pengalokasian belanja modal akan berdampak pada terhambatnya pembangunan di daerah.

Pelaksanaan pembangunan di daerah dapat dilakukan apabila terdapat ketersediaan sumber pembiayaan yang memadai. Sumber-sumber pembiayaan pembangunan tersebut terlihat pada kemampuan keuangan yang dimiliki oleh suatu daerah. Oleh karena itu, pengukuran kemampuan keuangan dan *fiscal stress* dalam penelitian ini dapat dijadikan bahan masukan bagi pemerintah kabupaten/kota di Sumatera Bagian Selatan untuk pembuatan kebijakan dan keputusan dalam pengalokasian anggaran untuk pembangunan dan peningkatan pelayanan publik.

1.2. Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang, maka rumusan masalah yang diajukan dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana tingkat kemampuan keuangan dan *fiscal stress* pada kabupaten/kota di Sumatera Bagian Selatan?
2. Bagaimana pengaruh kemampuan keuangan dan *fiscal stress* terhadap alokasi belanja modal pada kabupaten/kota di Sumatera Bagian Selatan?

1.3. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Menganalisis tingkat kemampuan keuangan dan *fiscal stress* pada kabupaten/kota di Sumatera Bagian Selatan.
2. Menganalisis pengaruh kemampuan keuangan dan *fiscal stress* terhadap alokasi belanja modal pada kabupaten/kota di Sumatera Bagian Selatan.

1.4. Manfaat Penelitian

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut.

Manfaat Akademis:

1. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pemikiran dalam lingkup akademik, terutama bidang ekonomi dan keuangan daerah.
2. Memperkaya dan memperdalam bahan kajian teori untuk pengembangan penelitian selanjutnya yang berkaitan dengan pengalokasian anggaran dan belanja daerah.

Manfaat Praktis:

1. Memberikan informasi bacaan dan kontribusi dalam ilmu pengetahuan untuk kajian-kajian yang berkaitan dengan kemampuan keuangan daerah, *fiscal stress* dan alokasi belanja modal.
2. Memberikan informasi yang berguna bagi pemerintah daerah untuk pengambilan keputusan dalam merancang anggaran pendapatan dan belanja yang lebih baik lagi di masa mendatang.

DAFTAR PUSTAKA

- Adisasmita, R. (2011). *Pembiayaan Pembangunan Daerah. Graha Ilmu: Yogyakarta.*
- Adriana, M., Basri, Y. M., & Indrawati, N. (2017). Variabel yang Mempengaruhi Fiscal Stress di Kabupaten/Kota Se-Provinsi Riau. *Jurnal Ekonomi*, 25(2).
- Agus, E., & Safri, M. (2016). Kinerja Keuangan Daerah dan Pembiayaan Belanja Modal Kabupaten Merangin. *Jurnal Perspektif Pembiayaan Dan Pembangunan Daerah*, 4(1), 37–50.
- Alegre, J. G. (2010). Decentralization and the composition of public expenditure in Spain. *Regional Studies*, 44(8), 1067–1083.
- Arif, M., & Arza, F. I. (2018). Pengaruh Kinerja Keuangan Terhadap Alokasi Belanja Modal Pemerintah Daerah Di Kabupaten Dan Kota Provinsi Sumatera Barat Tahun 2013-2017. *Jurnal Riset Manajemen & Akuntansi*, 9(2), 21–36. Retrieved from
- Arnett, S. (2011). *Fiscal Stress in the U . S . States : an Analysis of Measures and Responses Copyright 2011 By Sarah Arnett Fiscal Stress in the U . S . States : an Analysis of.* Retrieved from
- Assyurriani, R. (2015). Pengaruh Rasio Kemandirian Daerah, Rasio Efektivitas, Rasio Efisiensi, Rasio Aktivitas dan Rasio Pertumbuhan terhadap Belanja Modal Pada Pemerintah Kabupaten Dan Pemerintah Kota Di Kepulauan Riau Tahun 2010 – 2013. *Jurnal Akuntansi*, 2–20.
- Azwardi et al. (2020). Modul 3: Indikator Pembangunan Ekonomi dan Keuangan Daerah. *Unsri Press: Palembang.*
- Basuki, A. T., & Prawoto, N. (2016). Analisis Regresi Dalam Penelitian Ekonomi & Bisnis. *Depok : PT Rajagrafindo Persada.*
- Christy, F. A., & Adi, P. H. (2009). Hubungan Antara DAU, Belanja Modal dan Kualitas Pembangunan Manusia. *Paper The 3rd National Conference UKWMS, Surabaya*, Hal 1-16.
- Delima, N. A., & Marwa, T. (2016). Kinerja keuangan daerah terhadap belanja modal untuk pelayanan publik di Sumatera Bagian Selatan. *Jurnal Ekonomi Pembangunan*, 14(2), 69–78.
- Grisorio, M. J., & Prota, F. (2015). The Impact of Fiscal Decentralization on the Composition of Public Expenditure: Panel Data Evidence from Italy. *Regional Studies*, 49(12), 1
- Halim, A. (2012). *Akuntansi Keuangan Daerah. Jakarta: Salemba Empat.*
- Halim, Abdul. (2004). *Bunga Rampai Manajemen Keuangan Daerah Edisi Revisi. Yogyakarta: UPP AMP YKPN.*

- Hevesi, A. G. (2006). Analysis of Fiscal Stress in New York State's Cities. *Local Government Issues in Focus*, 2(1), 1–20.
- Huda, A. S. (2015). Pengaruh Kinerja Keuangan, Fiscal Stress dan Kepadatan Penduduk Terhadap Alokasi Belanja Modal di Nusa Tenggara Barat. *JASSETS: Jurnal Ekonomi, Manajemen Dan Akuntansi*, Vol 5(2), Hal 151-166.
- Indiyanti, N. M. D., & Rahyuda, H. (2018). Pengaruh Kinerja Keuangan Daerah Terhadap Alokasi Belanja Modal di Provinsi Bali. *E-Jurnal Manajemen Universitas Udayana*, 7(9), 4713.
- Jia, J., Guo, Q., & Zhang, J. (2014). Fiscal decentralization and local expenditure policy in China. *China Economic Review*, 28, 107–122. <https://doi.org/10.1016/j.chieco.2014.01.002>
- Kwon, O. (2003). The effects of fiscal decentralization on public spending: The Korean case. *Public Budgeting and Finance*, 23(4), 1–20. <https://doi.org/10.1111/j.0275-1100.2003.02304001.x>
- Manafe, M. W. N., Ena, Z., & Adu, S. S. (2019). FISCAL STRESS: Studi Kasus Pemda Provinsi Nusa Tenggara Timur. *Wahana*, 21(2), 125–135. <https://doi.org/10.35591/whn.v21i2.152>
- Mangkoesebroto, G. (2017). Ekonomi Publik Edisi Ketiga. *BPFE: Yogyakarta*.
- Mardiasmo. (2009). Akuntansi Sektor Publik. *Yogyakarta: Penerbit Andi*.
- Muda, I. (2015). *Variabel Yang Mempengaruhi Fiscal Stress Pada Kabupaten/Kota di Sumatera Utara*. (February). <https://doi.org/10.13140/2.1.3934.2880>
- Nazir, M. (2013). Metode Penelitian. *Bogor: Ghalia Indonesia*.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri N0. 27 Tahun 2013 tentang. (n.d.). *Pedoman Penyusunan Anggaran Dan Belanja Daerah*.
- Praza, E. I. (2016). Analisis Pengaruh Kinerja Keuangan Terhadap Alokasi Belanja Modal di Provinsi Jambi. *Jurnal Perspektif Pembiayaan Dan Pembangunan Daerah*, Vol. 4(1), 25–36.
- Prihatiningsih, A. (2010). Analisis Kemampuan Keuangan Daerah Dalam Pelaksanaan Otonomi Daerah Di Kota Surakarta. *Skripsi Jurusan Ekonomi Pembangunan, Fakultas Ekonomi, Universitas Sebelas Maret, Surakarta*.
- Putra, W. (2018). Tata Kelola Ekonomi Keuangan Daerah. *Depok: Rajawali Pers*.
- Rizkiano, A. (2011). Pengukuran Tingkat Kemampuan Keuangan Daerah Dalam Mendukung Pelaksanaan Otonomi Daerah Periode 2004-2008 Di Kota Salatiga. *Skripsi, Universitas Diponegoro*.
- Rusydi, B. (2010). *Deteksi Ilusi Fiskal (Studi Kasus Provinsi di Indonesia Tahun 2005-2008)*. 1–118.

- Savitry, E., Saleh, H. A., & Arifin, I. (2011). Analisis Kemampuan Keuangan Daerah dalam Pelaksanaan Otonomi Daerah Tahun 2007-2011 di Kota Makassar. *Government: Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 4(1), 23–34.
- Sejati, T. P. (2013). Pengaruh Fiscal Stress terhadap Pertumbuhan Pendapatan Asli daerah dan belanja modal (studi pada Provinsi Jawa Timur 2007-2009). *Artikel Ilmiah, STIE Perbanas Surabaya*.
- Setiawina, N. D. (2016). Pengaruh Kinerja Keuangan Pada Alokasi Belanja Modal Dan Pertumbuhan Ekonomi Pemerintah Kabupaten/Kota Se-Provinsi Bali Tahun 2006 S.D. 2013. *Buletin Studi Ekonomi*, 20(2), 104–112.
- Setyawan, B., & Adi, P. H. (2008). Pengaruh Fiscal Stress Terhadap Pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah Dan Belanja Modal. *Fakultas Ekonomi Universitas Kristen Satya Wacana*, 1–12.
- Shamsub, H., & Akoto, J. B. (2004). State and local fiscal structures and fiscal stress. *Journal of Public Budgeting, Accounting & Financial Management*, 16(1), 40–61. <https://doi.org/10.1108/jpbafm-16-01-2004-b003>
- Sjafrizal. (2014). Perencanaan Pembangunan Daerah Dalam Era Otonomi. *Rajawali Pers, Jakarta*.
- Sugiyono, P. D. (2018). Statistik Nonparametris Untuk Penelitian. *Bandung: CV Alfabeta*.
- Sularso, H., & Restianto, Y. E. (2011). Pengaruh kinerja keuangan terhadap alokasi belanja modal dan pertumbuhan ekonomi kabupaten/kota di Jawa Tengah. *Media Riset Akuntansi, Vo. 1 No.*, Hal 109-124.
- Suwandi, K. A., & Tahar, A. (2016). Pengaruh Kinerja Keuangan terhadap Pertumbuhan Ekonomi Daerah Dengan Alokasi Belanja Modal Sebagai Variabel Intervening (Studi pada Pemerintah Kabupaten/Kota D.I. Yogyakarta). *InFestasi*, 11(2), 118.
- Tamawiwiy, J., Sondakh, J. J., & Warongan, J. D. . (2016). Pengaruh Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Terhadap Belanja Modal Untuk Pelayanan Publik (Studi pada kabupaten dan kota di Provinsi Sulawesi Utara). *Jurnal Riset Akuntansi Dan Auditing "Goodwill,"* 7(2), 103–124. <https://doi.org/10.35800/jjs.v7i2.13555>
- Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang *Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah*.